

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Ali, Ahmad, 1993, *Menguak Tabir Hukum Putusan Pengadilan*, Program Pascasarjana:Universitas Sunan Giri,Sidoarjo.
- Anggara, E. A. (2015). *Menyeimbangkan Hak : Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform
- Diporapramono, Abdulhamid.2017, *Keterbukaan dan Sengketa Informasi Publik*,Jakarta :Renebook
- Freidman,2001, *Hukum AmerikaSebuah Pengantar*(terjemahanWishnu Basuki), Jakarta:PT NusaSuteki
- G.H Addink,G.Anthony, 2010 , A.C Buyse & C.Flinterman (eds), *Human Rights and Good Governance*,Utretch:Universite it Utretch.
- Jazim Hamidi, 1999 , *Penerapan Asas Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPUB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Phillipus M.Hadjon, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Infonesia*(*Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Yogyakarta:Universitas Gadjah Mada
- SF.Marbun, 2011, *Menggali dan Menemukan Asas-Asas UmumPemerintahan yang Baik di Indonesia,tulisan pada Dimensi-Dimensi Pemikiran \Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta:Ull Press.
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suteki, 2013, *Desain Hukum di Ruang Sosial*, Semarang:Thafa Media.
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik Cet.3*. (Depok: RajaGrafindo Persada). 2020.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.

Wijoyo Suparto, 2005, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Surabaya: Airlangga University Press.

Zulfikli Amsyah, 1977, *Manajemen System Informasi*, Jakarta : Gramedia Pustaka Umum

B. Jurnal Hukum :

AbidZamzami, (2020). *Pelaksanaan Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*. “Jurnal Universitas IslamMalang”.Vol.3, No.2, Juni 2020, Hal. 208

Afif Juniar dan Anna Erliyana, (2021). *Perbandingan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia Dengan Korea Selatan*” Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia” Vol. 6, No. 1, Hal. 5-17

Agus Budi Susilo, (2013). *Reformulasi Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam konteks Kompetensi Absolut Peradilan Tata usaha Negara.*” Jurnal Hukum dan Peradilan”. Vol. 2, No.2, Hal294.

Agus Setiawan dkk, (2013), *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Pemerintahan Kota Bandung Kepada Warga Kota)*,”Jurnal Kajian Komunikasi” Vol. 1, No. 2, Hal. 196-205

Aju Putrijanti & KCS Wibawa. (2021). *The Implementation of E-Court in Administrative Court to Develop Acces to Justice in Indonesia*”. Jurnal of Environmental Treatment Thechniques. Vol. 9, Issue 1, Hal. 107

Ayu Putriyanti, (2015). *Kajian Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Kaitan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.*”Jurnal Pandecta”. Vol. 10,No. 2, Hal.181

Paulus Effendi Lotulung, (1991). *Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Rechstaat Republik Indonesia*, “Jurnal Hukum dan Pembangunan”, Vol. 21, No. 6,Hal. 580.

Dyah Adrianti Sintha Dewi,(2014).*Analisis Yuridis Pelayanan Publik yang Baik sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance dalam*

Konsep Welfare State, "Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang", Vol. 5, No. 2. Hal. 174

- Delfina Gusman, (2010). *Efektifitas Pelaksanaan Upaya Paksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap*, "Jurnal Masalah-Masalah Hukum", Jilid 39, No. 3, Hal. 222.
- Endang Retnowati, (2012). *Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (antara Das Sein dan Das Sollen)*. "Jurnal Perspektif", Vol. XVII, No.1, Hal. 56
- Francisca Romana Harijiyanti dan Sunarya Raharja, (2014). *Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa (Studi Gugatan Organisasi Lingkungan Hidup)*, "Jurnal Mimbar Hukum", Vol. 26, No. 2, Hal. 261
- Muhammad Azar, (2015). *Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara*. "Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro" Edisi 08, No 2, Hal 282-283
- Nur Asyiah, (2018). *Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara*. "Jurnal Hukum Samudra Keadilan". Vol. II, No. 1, Hal. 50
- Ni Komang Dewi.dkk. (2021) . *Penerapan Asas Hakim Aktif (Dominus Litis) Dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan No.1/G/2017/PTUN/DPS)*, "Jurnal Preferensi Hukum" Vol. 2 No. 1, Februari 2021, Hal. 28.
- Nunuk Febrianingsih, (2012). *Implementasi Informasi Publik dalam pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik (Public Information Disclosure in Open Government Towards Good Governance)*, "Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional" Vol. 1, No.1, Hal 125-155
- Putrijanti, Leonard, dan Utama. 2014. *Peran PTUN dan AUPB menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*. "Jurnal Mimbar Hukum: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro". Vol 30, No 2, Tahun 2014, Hal. 282
- Rizqan Naelufar, (2013). *Perluasan Kompetensi PTUN dalam mengadili Sengketa Informasi Publik*. "Unnes Law Journal" Vol 2, No 1, 2013, Hal 69

Shandi Patria Airlangga, *Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis.* "Jurnal Magister Ilmu Hukum:Unila". Vol, 3,No.1, Hal.3

Tita Shabrina dan Tamsil, (2020). *Analisis Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Putusan Ptun Nomor : 2/G/Ki/2016/Ptun-Jkt)*, "Novum : Jurnal Hukum", Vol. 7, No. 4, Hal. 129-136.

Tony Prasetyo, (2016), *Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang*, "Jurnal Spektrum Hukum", Vol. 13, No.2, Hal. 245-247.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang PTUN
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang PTUN atas perubahan UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN
5. Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang PTUN atas perubahan UU No 5 Tahun 1986 tentang PTUN
6. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
7. Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

D. Skripsi Hukum :

Feriardi, 2018, Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. **Skripsi.** Program Sarjana Universitas Islam Indonesia. Jogjakarta